

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH SERANG MELALUI BUDIDAYA JAMUR TIRAM OLEH
CABANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN**

Oleh : Dadan Rukandar

Konsep pemberdayaan mulai terkenal sejak tahun 1990-an dalam pembangunan, telah diyakini bahwa konsep pemberdayaan sebagai alternatif ampuh untuk menuntaskan pembangunan. Pemerintah pusat di beberapa kementerian secara tegas membentuk berbagai lembaga pemberdayaan, bahkan ada kementerian yang mengkhususkan pada pemberdayaan perempuan. Ada juga program nasional yang fokus pada pemberdayaan yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNMP Mandiri). Begitu pula tingkat pemerintah daerah provinsi dan kabupaten / kota telah membuka lembaga atau satuan kerja (satker) yang menangani khusus tentang pemberdayaan masyarakat. Dan sekarang banyak pemerintah daerah yang langsung membentuk lembaga dengan nama pemberdayaan, misalnya : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pemberdayaan (yang merupakan proses) menjadi manusia sebagai pribadi yang berdaya dengan banyaknya pilihan-pilihan yang bisa diambil tanpa ada tekanan atau paksaan. Dan makna lain berdaya itu adalah ketika tersedianya pilihan-pilihan untuk memilih atau memiliki sesuatu. Dalam hal ini masyarakat tidak hanya menjadi objek dari pemberdayaan yang diusahakan, tetapi juga sekaligus menjadi subjek dari pemberdayaan itu sendiri. Ini disebut dengan pembangunan yang berpusat pada manusia, yaitu pada upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dengan memfokuskan pada pemberdayaan dan pembangunan manusia itu sendiri (M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 2).

Pengertian Pemberdayaan adalah upaya memperluas kemampuan, dan pilihan bagi masyarakat. Artinya masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan (T. Lembong Misbah, M. Jakfar Puteh, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat Islam, Tinjauan Normatif, Teoritik Dan Aplikatif*, 2012), hal, 4). Adapun pemberdayaan juga memberikan sumber-sumber, pengetahuan dan keterampilan kepada orang-orang untuk menentukan diri mereka sendiri dimasa mendatang dan untuk berpartisipasi dalam memengaruhi kehidupan masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan adalah kata kunci yang sangat berguna untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam skema jangka panjang sebagaimana yang dicita citakan oleh pekerja sosial. Proses-proses pengembangan masyarakat yang tidak mendidik kemandirian, berjangka pendek, charity, sedapat mungkin harus dapat, dihindari dalam proses pengembangan masyarakat.

Sebagai negara agraris, bagian terbesar dari penduduk Indonesia khususnya di Provinsi Banten bermata pencaharian pokok sebagai petani. Hal ini berarti sumber ekonomi dan sosial penduduk sangat tergantung pada tata produksi dan hasil-hasil pertanian dan hasil hutan. Dengan demikian, persoalan pertanian sesungguhnya merupakan masalah pokok bagi masyarakat Indonesia. Masalah pertanian dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Namun disayangkan, pembicaraan mengenai nasib masyarakat sekitar hutan selalu tidak jauh dari kata kemiskinan, keterbelakangan, kesehatan rendah, kualitas hidup yang pas-pasan, dan hal-hal lain yang menunjukkan betapa kondisi petani selalu berada dalam keadaan yang memprihatinkan. Keadaan seperti ini tentunya bukan atas kehendak mereka sendiri, artinya seandainya diberikan ruang alternatif yang cukup bagi petani untuk memilih antara kemakmuran dan kemiskinan, tentu mereka tidak akan memilih kondisi kemiskinan.

Sensus Pertanian Tahun 2013 mengungkapkan bahwa berbagai jenis usaha pertanian ditemukan disemua wilayah Provinsi Banten. Proporsi luas wilayah Provinsi Banten sendiri yang telah digunakan untuk usaha pertanian dan perkebunan pada tahun 2013 mencapai 78,4 persen dari luas daratan. Lahan untuk usaha pertanian dan perkebunan terdiri dari lahan pertanian sawah 21,9 persen dan lahan perkebunan 56,5 persen. Walaupun demikian, tingkat pertumbuhan penduduk di Banten ternyata lebih cepat dibandingkan pertumbuhan produksi pangan (BPS Banten tahun 2014).

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) bulan September 2017, jumlah penduduk miskin di Banten pada periode yang sama bertambah sebesar 24,79 ribu orang dari 675,04 ribu orang pada Maret 2017 menjadi 699,83 ribu orang pada bulan September 2017. Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan. Selama periode Maret-September 2017, Garis Kemiskinan di Provinsi Banten naik sebesar 5,23 persen, yaitu dari Rp386.753,- perkapita per bulan pada Maret 2017 menjadi Rp 406.988,- perkapita perbulan pada September 2017. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Jika mengacu Susenas, peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi nonmakanan, yang terdiri dari perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Porsi beras dan rokok kretek filter menjadi komoditi yang memberi pengaruh besar pada kenaikan Garis Kemiskinan baik dikota maupun dipedesaan pada September 2017. Saat ini sebagian besar penduduk miskin tinggal di desa atau daerah sekitar kawasan sekitar hutan, termasuk di Desa Cikumbeun Kec. Mandalawangi Kab. Pandeglang dan Desa Kamasan Kec. Cinangka Kabupaten Serang.

Sebagaimana diketahui Kerusakan lingkungan akibat kerusakan hutan banyak disebabkan oleh penebangan hutan secara liar, tanpa memperhatikan keberlangsungan ekosistem hutan serta makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Selain perusahaan besar, masyarakat lokal juga dituduh sebagai pelaku pembabatan hutan. Persoalan ekonomi paling sering menjadi alasan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, untuk melakukan penebangan pohon secara ilegal. Hal yang sama terjadi di Desa Cikumbeun Kec. Mandalawangi Kab. Pandeglang dan Desa Kamasan Kec. Cinangka Kabupaten Serang.

Desa Kamasan Kec. Cinangka Kabupaten Serang dan Desa Cikumbueun Kec. Mandalawangi Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu kampung dimana kondisi ekonomi masyarakatnya masih tergolong dalam garis kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha. Dalam artian ini, Kemiskinan dipahami sebagai keadaan kurangnya uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dalam hal ini Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Pandeglang Serang dan Cilegon sebagai salah satu organisasi pemerintah yang mempunyai tugas pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan sekitar hutan pada tahun 2019 ini melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pekerjaan budidaya jamur tiram di daerah Desa Cikumbeun Kec. Mandalawangi Kab. Pandeglang dan Desa Kamasan Kec. Cinangka Kabupaten Serang.

Pada tahun 2018 pemberdayaan masyarakat melalui budidaya jamur tiram dilaksanakan berada di Kecamatan Mancak. Program tersebut diadakan bertujuan untuk meningkatkan dan mensejahterakan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan. Kelompok yang mendapatkan bantuan program pemberdayaan masyarakat melalui budidaya jamur tiram Oleh karena itu lanjutan program ini diadakan pelatihan pembudidayaan jamur tiram adalah kelompok yang pernah mengikuti Pelatihan Budidaya Jamur Tiram oleh sie penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat DLHK Provinsi Banten Tahun 2018.

Dipilihnya pembudidayaan Jamur tiram sebagai program pemberdayaan kepada masyarakat dikarenakan prosesnya cukup mudah, serta mengandung nilai gizi yang besar manfaatnya bagi kesehatan. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam membudidayakan jamur tiram merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Banten kepada warga. Melalui pemberdayaan tersebut diharapkan warga bisa mandiri dalam berwirausaha, dalam hal ini adalah budidaya jamur sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan. Budidaya jamur tiram tidak terlalu banyak modal dan tingkat risiko juga tidak terlalu tinggi, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi alternatif bagi masyarakat binaan kami untuk menjadi penghasilan tambahan. Selain itu dalam proses pembudidayaan jamur tiram ini, tidak ada sampah yang dihasilkan jika jamur telah dipanen karena

masih bisa digunakan untuk kegiatan. Budidaya jamur ini kita menyebutnya Zero Waste Mushroom Applied, jadi tidak ada sampah yang dihasilkan karena limbah baglog bisa digunakan untuk budidaya cacing Lumbricus dan limbah plastik baglognya digunakan untuk media semai tanaman hortikultura, sehingga tidak ada dampak pada lingkungan (koran BUMN, Juni 2019). Secara ekonomis budidaya jamur tiram ini sangat menguntungkan dan menjanjikan sehingga dapat membantu ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Potensi masyarakat Desa Kamasan Kec. Cinangka Kabupaten Serang dan Desa Cikumbueun Kec. Mandalawangi Kabupaten Pandeglang yang berpenghasilan dari hasil hutan dan berkebun ini, terkadang belum sepenuhnya bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari dengan pendapatan yang tidak tetap ditambah lagi dengan harga kebutuhan lebih besar dari pada penghasilan yang didapatkan. Oleh sebab itu, dengan adanya usaha pembudidayaan jamur tiram ini, ekonomi keluarga yang pada awalnya sangat memprihatinkan diharapkan bangkit dengan adanya usaha budidaya jamur tiram ini, sebab usaha ini lebih cepat panen dan hasil yang menjanjikan.

Foto Foto Kegiatan



Referensi

1. M. Anwas, Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 2.
2. T. Lembong Misbah, M. Jakfar Puteh, Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat Islam, Tinjauan Normatif, Teoritik Dan Aplikatif, (2012), hal, 4.
3. Koran BUMN, Juni 2019.
4. BPS Banten tahun 2014.
5. Rawdah. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Usaha Budidaya Jamur Tiram di Kampung Ulu Nuwih AcehTengah. UIN Ar Raniry Banda Aceh. 2018